PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG

TAHUN
2025

RENSTRA 2025 - 2029
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan,	Petugas Verifikator,
Ewiek Khavida, S.STP, MM	Arthati Dwi Hutami, S.E.
NIP. 19831118 200212 2 001	NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini sebagai operasionalisasi RPJMD yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 tersebut didasarkan pada periode sejak dilantiknya Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung pada tanggal 20 Februari 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 61 ayat (2).

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung, 19 September 2025
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Ripto Susilo

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 26
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 26
3.2. Strategi 29
3.3. Arah Kebijakan 31
3.4. Manajemen risiko 32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 33
BAB V PENUTUP 80
LAMPIRAN 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat Daerah..... 18
Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat Daerah..... 19
Tabel 2. 3 (Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah)..... 20
Tabel 2. 4 (Capaian indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah)..... 21
Tabel 2. 5 Permasalahan dan Isu Strategis..... 25
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah..... 28
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah..... 29
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah..... 31
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah..... 33
Tabel 4. 2 Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan..... 54
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 72
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama..... 74
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah..... 77
Tabel 4. 6 Dukungan Sekretariat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional..... 78
Tabel 4. 7 Daftar Program Sekretariat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional..... 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... 2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung 17
Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah..... 27
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah 27
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra..... 33

BAB I
PENDAHULUAN

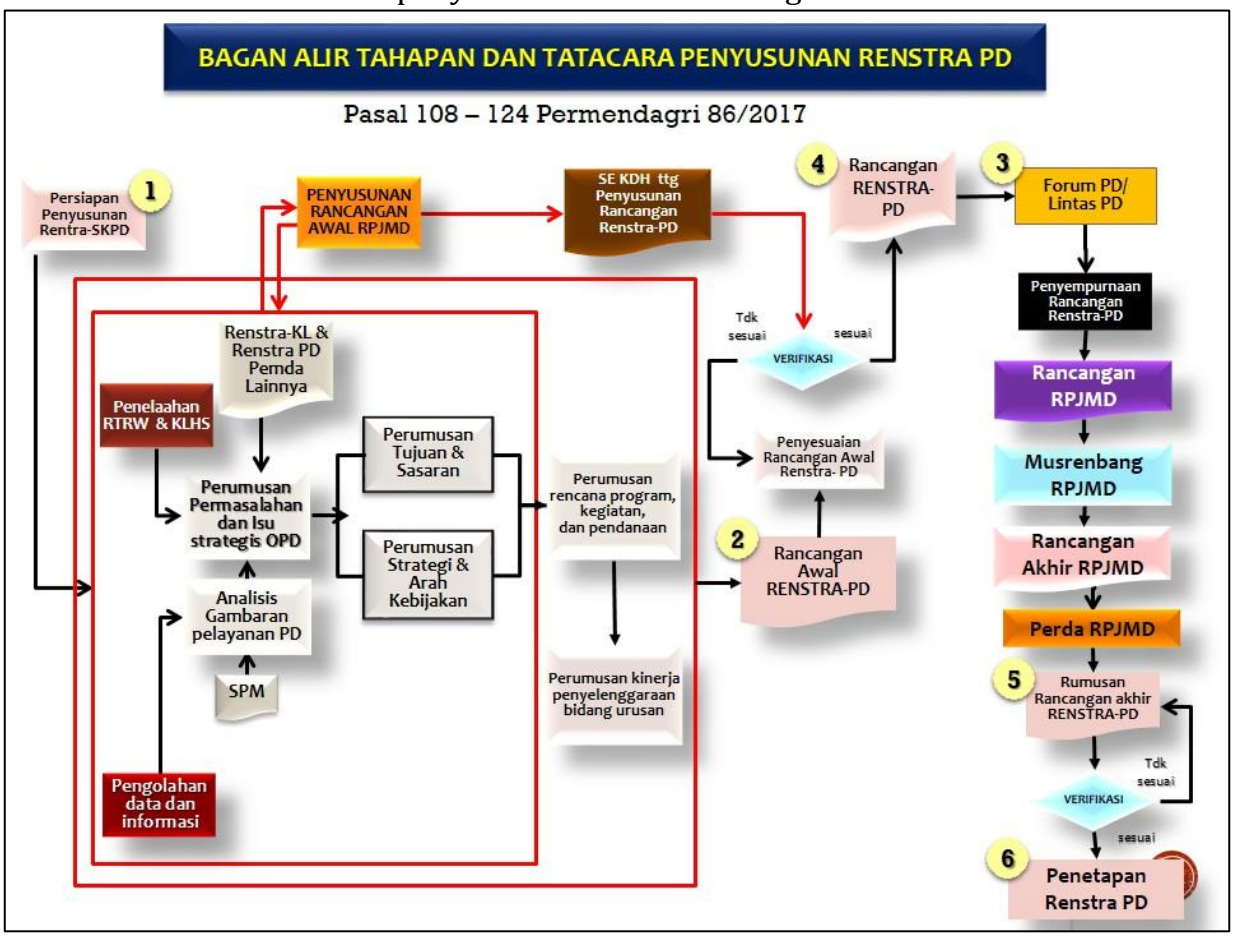
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Keberadaan Sekretariat Daerah menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Pembangunan di Sekretariat Daerah bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat .

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Daerah adalah berikut :
    a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
    b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
    c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.

d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
    a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
    b) Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.

2. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah adalah :
    a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
    b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
    c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
    d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik *(good governance)*

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

   Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

   Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

   Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :
   a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
   b. Sumber daya perangkat daerah
   c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
   d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

   Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :
   a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)

b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)

2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
   b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uruaian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
        a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
        b) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
        a) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
        b) Sub Koordinator Bina Mental.
    3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
        a) Sub Koordinator Perundang-Undangan;
        b) Sub Koordinator Bantuan Hukum;
        c) Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
    1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
        a) Sub Koordinator Ekonomi Daerah;
        b) Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah.
    2. Bagian Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
        a) Sub Koordinator Administrasi Pembangunan;
        b) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
    3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
        a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;

b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:

1. Bagian Umum, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
   a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
   c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
   a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
   b) Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
   a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
   b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, asisten-asisten masing masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan melalui Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah, sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
    a) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah, kerja sama dan otonomi daerah, pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
    b) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial kesejahteraan masyarakat dan bina mental.

c) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD, perekonomian dan sumber daya alam.

b) Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, mengoordinasikan administrasi dan pengendalian pembangunan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

c) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

c. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
   a) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
   b) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana dan reformasi birokrasi.
   c) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Adminiastrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

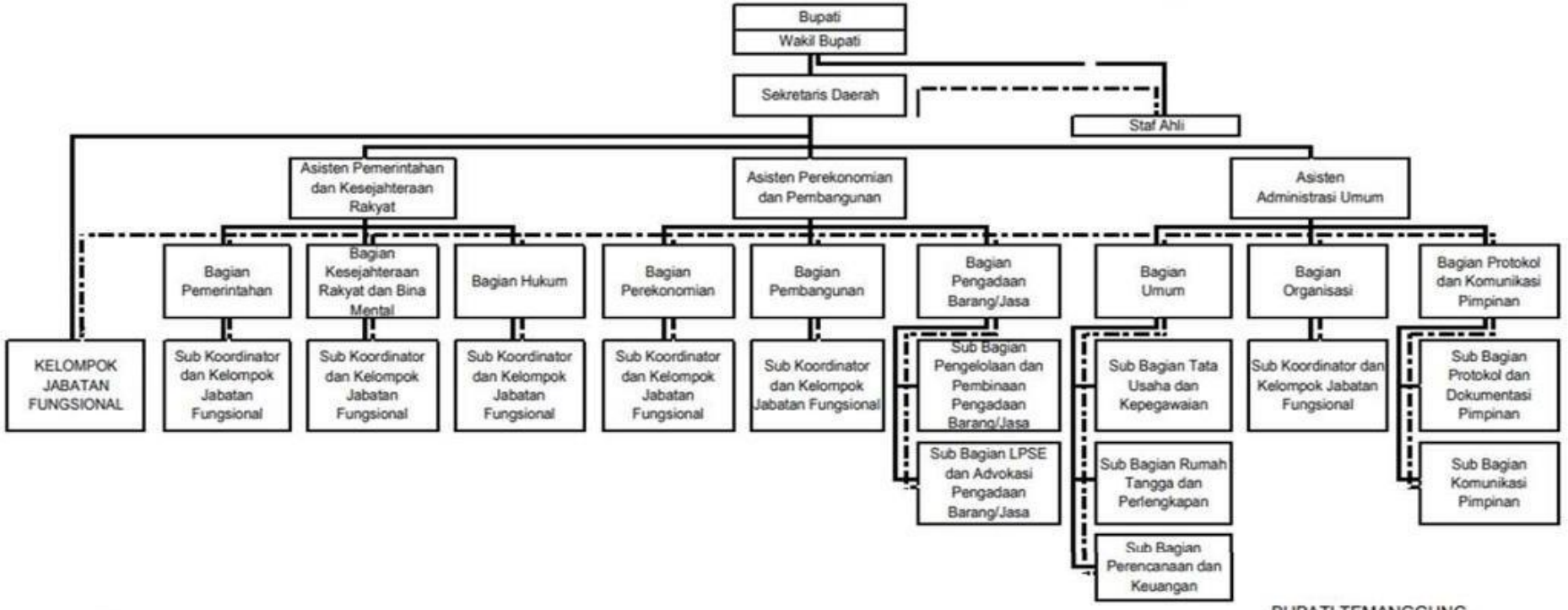
2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
SETDA
ENDRO SUWARSO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19[illegible] 199603 1 003

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Sekretariat Daerah disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat Daerah

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
KEPALA PERANGKAT DAERAH						1					1				
Fungsional					15	5				22					
Eselon 2						6					6				
Eselon 3					3	6				1	8				
Eselon 4				1	2	4									
Pelaksana	24			16	14				14	40					

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas

kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat Daerah

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan		37.917.885	
B	ASET TETAP			
1	Tanah	172.875 M2	32.484.018.400	
2	Peralatan dan Mesin	5.811	36.276.388.286	
3	Gedung dan Bangunan	Luas Lantai Bangunan = 27.010 M2 dan Luas Gedung = 29.510,40 M2	52.927.595.879	
4	Jalan, irigasi dan jaringan	Panjang = 5 KM Lebar = 5 M Luas = 5 M2	2.309.241.652	
5	Aset tetap lainnya	1.085	59.508.465	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Nihil	Nihil	
C	ASET LAINNYA	34	426.959.623	
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Nihil	
2	Aset Tidak Berwujud		Nihil	
3	Aset Lain-Lain		732.401.140	
D	EKSTRAKOMTABEL	4.443	641.675.000	
E	PROPERTI INVESTASI	3.085	Nihil	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2. 3
(Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,3453	3,05	3,05	3,4340	3,4340	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	60,16	62,11	63,84	64,73	na	
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	n.a	50	100	100	na	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan

pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2. 4
(Capaian indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	0	100%	0	0	BAGIAN PBJ
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	18,54%	84,94%	1,96%	15,55%	97%	Bagian PBJ
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	20,72%	50,62%	100%	100%	29%	BAGIAN PBJ
4	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	n.a	283,83%	-8%	30,34%	138%	BAGIAN PBJ

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat umum;
b. Masyarakat pengguna layanan langsung;
c. Organisasi masyarakat/kelompok/forum warga;
d. Forkopimda;
e. Perangkat Daerah;
f. Kelurahan dan Kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat Daerah antara lain:

a. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesra dan Bina Mental
   - Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2022 dikeluarkan oleh Kemendagri mendekati batas pengumpulan data LPPD.

- Terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuakan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan data;
- Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari kecamatan dan kurangnya lengkapnya data yang dikirim;
- Kondisi alam dan geografis lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah;
- Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan;
- Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal;
- Kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan yang sering berubah
- Adanya keterlambatan pelaporan dari penerima hibah.

b. Permasalahan Bidang Pembangunan, Perekonomian, dan Pengadaan Barang/Jasa
   - Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam input data RFK ke laporan setiap bulan masih terdapat Ketidaksesuaian data;
   - Pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kejadian kahar (bencana alam/banjir);
   - Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan;
   - Kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 50 juta secara keseluruhan;
   - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta;
   - Proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat;

- ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah dalam pengendalian dan distribusi ekonomi;
- Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD.

c. Permasalahan Bidang Organisasi, Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   - Masih minim komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi RB;
   - Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah kabupaten Temanggung;
   - Belum adanya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.
   - Belum optimalnya pelayanan publik
   - Kapasitas SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan;
   - Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;
   - Kualitas layanan keprotokolan masih perlu ditingkatkan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Sekretariat

Daerah. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik hal ini terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 86,01 meningka signifikan dari tahun 2023 (69,05) hal tersebut menunjukan potensi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi	1. Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai 2. Belum optimalnya dukungan dalam perumusan kebijakan dan produk hukum 3. Masih perlunya optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Peningkatan Keamanan dan Penegakan Hukum 2. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	1. Peningkatan kapasitas, kinerja birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik

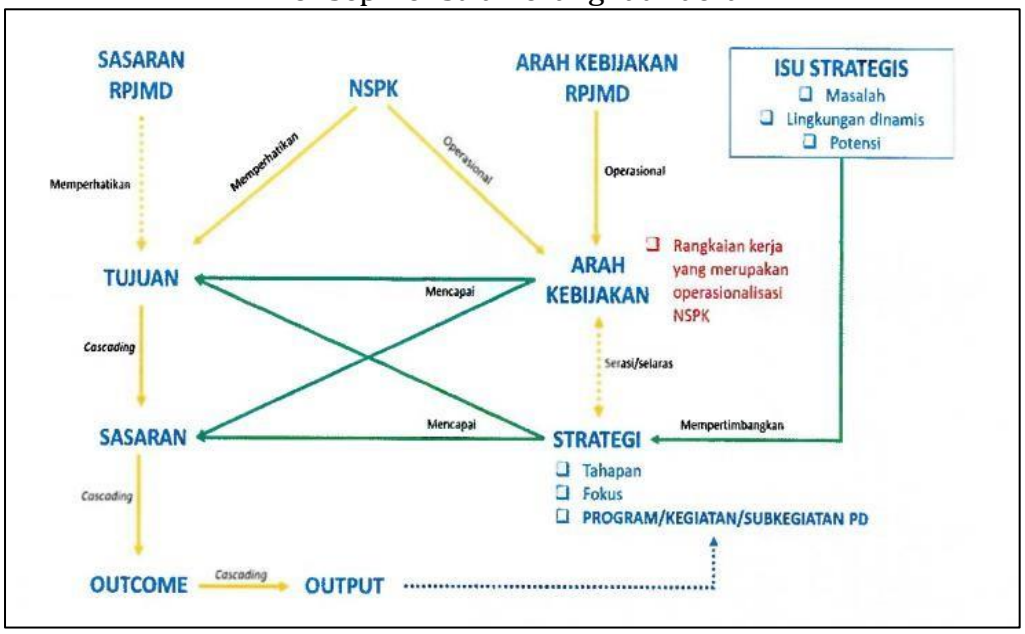
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

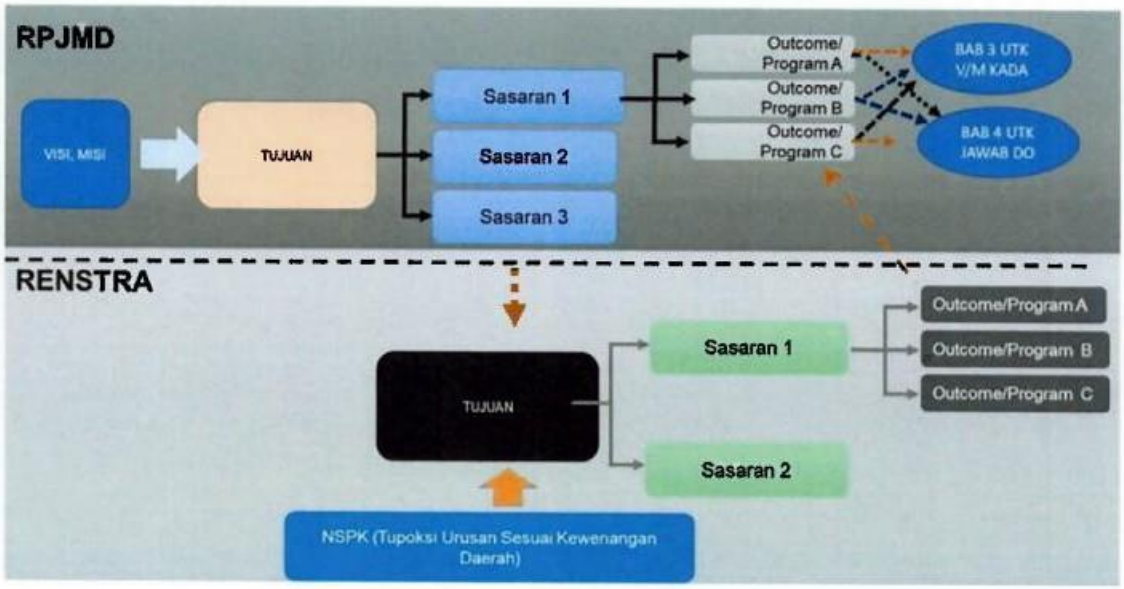
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Sekretariat Daerah diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah.

Gambar 3. 1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah											
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien		Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)	48,25	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	66,36	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Angka)	3,434	3,45	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50	
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (Angka)	96,88	96,98	97,08	97,18	97,28	97,38	97,48	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	

			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	3,82	3,9	3,93	3,97	4,01	4,05	4,07	
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Angka)	84,35	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB (%)	17,39	23,90	34,78	41,3	47,82	54,34	65,21	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah (Angka)	-	81	81,25	81,5	81,75	82	82,25	

Keterangan :

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2. Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif
Peningkatan kualitas kinerja	Peningkatan kualitas kinerja	Peningkatan kualitas kinerja	Peningkatan kualitas kinerja	Peningkatan kualitas kinerja

pelayanan birokrasi	pelayanan birokrasi	pelayanan birokrasi	pelayanan birokrasi	pelayanan birokrasi
Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik
Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun
Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Ket
1	NSPK/Tusi : 1. Unsur pendukung urusan pemerintahan 2. Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta meningkatkan pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah	Peningkatan kapasitas, kinerja birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	
		Peningkatan kualitas kebijakan	Peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	
			pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah	

3.4. Manajemen risiko

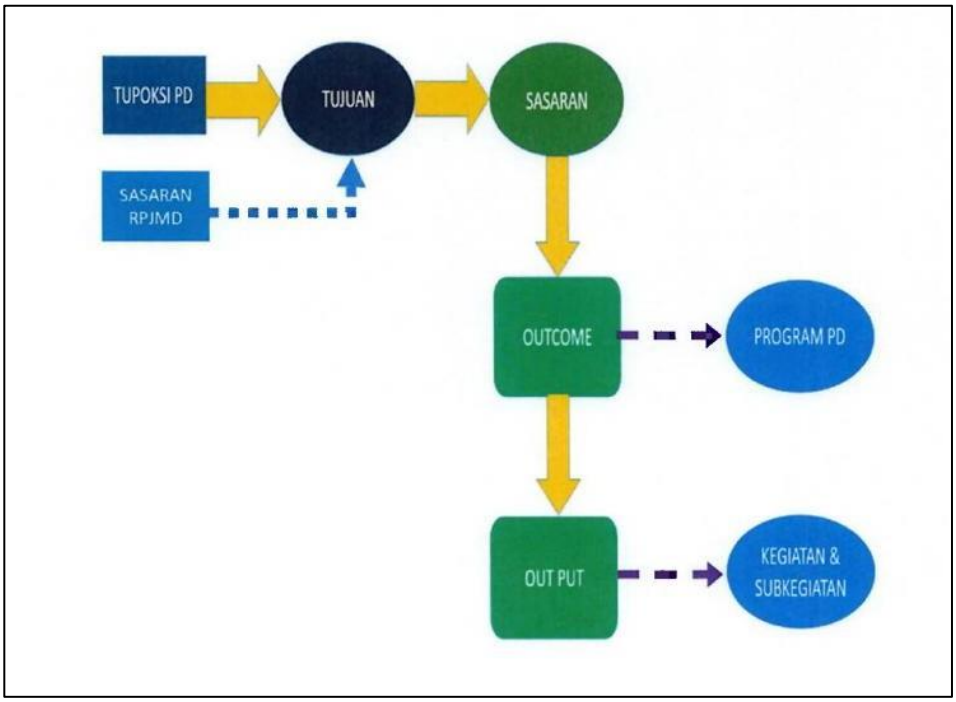
Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagaimana terlampir.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi lampiran dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahapan penilaian risiko, yaitu :

1. Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;
2. Identifikasi risiko dengan melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
3. Analisis risiko;
4. Kegiatan pengendalian;
5. Informasi dan komunikasi; dan
6. Pemantauan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam indikator rencana program kegiatan Sekretariat Daerah sebagaimana indikator 4.1.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Angka)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	

			Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum			Indeks Reformasi Hukum (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum		Persentase produk hukum yang difasilitasi (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	

					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual			Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual (%)		
			Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi (%)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

					Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	

				Tercapaianya indikator Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan pada kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)			Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Angka)		
			Terselenggaran ya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Presentase Pendampingan proses PBJ (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Perangkat daerah berpredikat BB (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Nilai AKIP Sekretariat Daerah	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tercapainya indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercapainya indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Tercapainya indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tercapainya indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah (Angka)		
			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tercapainya indikator Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tercapainya indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
			Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Pemerintahan							

- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Angka)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri				
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum			Indeks Reformasi Hukum (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum				
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual			Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual (%)		
			Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan				
4.01.0.00.0.00.01.0013 - Bagian Hukum							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi		

					Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Angka)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri				
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum			Indeks Reformasi Hukum (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum				
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual			Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual (%)		
			Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan				
4.01.0.00.0.00.01.0020 - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Angka)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri				

		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum			Indeks Reformasi Hukum (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum				
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual			Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual (%)		
			Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan				
4.01.0.00.0.00.01.0021 - Bagian Perekonomian							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi (%)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan				
			Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian				
4.01.0.00.0.00.01.0022 - Bagian Pembangunan							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		

ekonomi dan layanan publik							
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi (%)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan				
4.01.0.00.0.00.01.0023 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi (%)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan				
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)			Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Angka)		
			Terselenggaran ya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa				
4.01.0.00.0.00.01.0031 - Bagian Umum							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		

aktivitas ekonomi dan layanan publik							
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Perangkat daerah berpredikat BB (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah (Angka)		
			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah				
			Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah				
4.01.0.00.0.00.01.0032 - Bagian Organisasi							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Perangkat daerah berpredikat BB (%)		
			Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik				
4.01.0.00.0.00.01.0033 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan							

- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				Indeks Kualitas Kebijakan (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Perangkat daerah berpredikat BB (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah (Angka)		
			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah				
			Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah				

Berdasarakan tabel 4.1 diketahui bahwa tujuan Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien didukung dengan 7 sasaran yang menjadi kewenangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 25 indikator program yang didukung oleh 14 Kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Tabel 4. 2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				61.314.655.810,71		61.589.038.887,19		62.511.648.560,44		64.039.170.950,94		63.947.183.459,45		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.302.332.310,71		30.555.006.757,19		31.046.243.387,44		31.982.216.160,94		31.867.788.800,45		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	25.144.333.004,00	100	25.276.824.631,00	100	25.528.822.864,00	100	26.190.033.151,00	100	26.084.745.879,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	nilai AKIP sekretariat Daerah (Angka)	72,85	76		76,25		76,50		76,75		77			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.257.755.678,00		14.257.755.678,00		14.257.755.678,00		14.257.755.678,00		14.257.755.678,00		
Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	14.257.755.678,00	12	14.257.755.678,00	12	14.257.755.678,00	12	14.257.755.678,00	12	14.257.755.678,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	134	134		134		134		134		134			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.256.755.678,00		14.256.755.678,00		14.256.755.678,00		14.256.755.678,00		14.256.755.678,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	134	134	14.256.755.678,00	134	14.256.755.678,00	134	14.256.755.678,00	134	14.256.755.678,00	134	14.256.755.678,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.437.000.000,00		2.437.000.000,00		2.537.000.000,00		2.698.210.287,00		2.698.210.287,00		
Tercapainya indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	2.437.000.000,00	12	2.437.000.000,00	12	2.537.000.000,00	12	2.698.210.287,00	12	2.698.210.287,00		

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	228	228		228		228				228			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.000.000,00		122.000.000,00		122.000.000,00		122.000.000,00		122.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	122.000.000,00	12	122.000.000,00	12	122.000.000,00	12	122.000.000,00	12	122.000.000,00		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	228	228	40.000.000,00	228	40.000.000,00	228	40.000.000,00		40.000.000,00	228	40.000.000,00		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		661.210.287,00		661.210.287,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	500.000.000,00	12	661.210.287,00	12	661.210.287,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.896.075.988,00		1.896.075.988,00		1.948.074.221,00		2.448.074.221,00		2.342.786.949,00		

Tercapainya indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			1.896.075.988,00	6	1.896.075.988,00	10	1.948.074.221,00		2.448.074.221,00	9	2.342.786.949,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				10		18		1		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				1		1		1					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1								1			
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1.894.712.728,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1.500.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1	1.894.712.728,00		
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00		0,00		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		100.000.000,00		151.998.233,00		151.998.233,00		151.998.233,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			100.000.000,00	6	100.000.000,00	10	151.998.233,00		151.998.233,00	9	151.998.233,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				296.075.988,00		296.075.988,00		296.075.988,00		296.075.988,00		296.075.988,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			296.075.988,00	10	296.075.988,00	18	296.075.988,00	1	296.075.988,00	10	296.075.988,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.159.938.595,00		4.159.938.595,00		4.159.938.595,00		4.159.938.595,00		4.159.938.595,00		
Tercapainya indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.159.938.595,00	12	4.159.938.595,00	12	4.159.938.595,00	12	4.159.938.595,00	12	4.159.938.595,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.094.868.750,00		1.094.868.750,00		1.094.868.750,00		1.094.868.750,00		1.094.868.750,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.094.868.750,00	12	1.094.868.750,00	12	1.094.868.750,00	12	1.094.868.750,00	12	1.094.868.750,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.055.069.845,00		3.055.069.845,00		3.055.069.845,00		3.055.069.845,00		3.055.069.845,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.055.069.845,00	12	3.055.069.845,00	12	3.055.069.845,00	12	3.055.069.845,00	12	3.055.069.845,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.219.900.000,00		2.352.391.627,00		2.452.391.627,00		2.452.391.627,00		2.452.391.627,00		
Tercapainya indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	2.219.900.000,00	12	2.352.391.627,00	12	2.452.391.627,00	12	2.452.391.627,00	12	2.452.391.627,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			

4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				19.900.000,00		19.900.000,00		19.900.000,00		19.900.000,00		19.900.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	19.900.000,00	1	19.900.000,00	1	19.900.000,00	1	19.900.000,00	1	19.900.000,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.100.000.000,00		1.232.491.627,00		1.232.491.627,00		1.232.491.627,00		1.232.491.627,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	1.100.000.000,00	6	1.232.491.627,00	6	1.232.491.627,00	6	1.232.491.627,00	6	1.232.491.627,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		
Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00		
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				169.662.743,00		169.662.743,00		169.662.743,00		169.662.743,00		169.662.743,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00	2	169.662.743,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				25.144.333.004,00		25.276.824.631,00		25.528.822.864,00		26.190.033.151,00		26.084.745.879,00	4.01.0.00.0.00.01.0031 -	

													Bagian Umum	
													4.01.0.00.0.00.01.0033 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,29	3,8	147.046.231,71	3,9	148.272.369,19	3,95	150.656.162,44	4	155.198.098,94	4,1	154.642.824,45	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				147.046.231,71		148.272.369,19		150.656.162,44		155.198.098,94		154.642.824,45		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2	147.046.231,71	2	148.272.369,19	2	150.656.162,44	2	155.198.098,94	2	154.642.824,45		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				20.000.000,71		20.500.000,19		22.000.000,44		23.500.000,94		23.000.000,45		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	20.000.000,71	2	20.500.000,19	2	22.000.000,44	2	23.500.000,94	2	23.000.000,45		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				70.000.000,00		70.500.000,00		71.000.000,00		72.000.000,00		71.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2	70.000.000,00	2	70.500.000,00	2	71.000.000,00	2	72.000.000,00	2	71.500.000,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				18.358.731,00		18.572.369,00		18.656.162,00		20.198.098,00		21.142.824,00		

Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	18.358.731,00	2	18.572.369,00	2	18.656.162,00	2	20.198.098,00	2	21.142.824,00		
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				38.687.500,00		38.700.000,00		39.000.000,00		39.500.000,00		39.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2	38.687.500,00	2	38.700.000,00	2	39.000.000,00	2	39.500.000,00	2	39.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0032 - Bagian Organisasi	
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah (%)	100	100	2.737.546.750,00	100	2.837.546.750,00	100	3.037.546.750,00	100	3.237.546.750,00	100	3.237.546.750,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		
Tercapainya indikator Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	50	50	340.000.000,00	50	340.000.000,00	50	340.000.000,00	50	340.000.000,00	50	340.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	50	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00		
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				2.397.546.750,00		2.497.546.750,00		2.697.546.750,00		2.897.546.750,00		2.897.546.750,00		

Tercapainya indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	2.397.546.750,00	12	2.497.546.750,00	12	2.697.546.750,00	12	2.897.546.750,00	12	2.897.546.750,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.557.546.750,00		1.657.546.750,00		1.857.546.750,00		2.057.546.750,00		2.057.546.750,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	1.557.546.750,00	12	1.657.546.750,00	12	1.857.546.750,00	12	2.057.546.750,00	12	2.057.546.750,00		
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah				2.737.546.750,00		2.837.546.750,00		3.037.546.750,00		3.237.546.750,00		3.237.546.750,00	4.01.0.00.0.00.01.0031 - Bagian Umum	
													4.01.0.00.0.00.01.0033 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	100	100	2.273.406.325,00	100	2.292.363.007,00	100	2.329.217.611,00	100	2.399.438.161,00	100	2.390.853.347,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	

4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		1.109.662.743,00		
Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	192	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	192	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00	192	600.000.000,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1.673.406.325,00		1.692.363.007,00		1.729.217.611,00		1.799.438.161,00		1.790.853.347,00		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	2.000	2.000	1.673.406.325,00	2.000	1.692.363.007,00	2.000	1.729.217.611,00	2.000	1.799.438.161,00	2.000	1.790.853.347,00		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	800	800		800		800		800		800			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	500	500		500		500		500		500			
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				468.452.253,00		472.357.800,00		479.952.533,00		494.421.530,00		494.421.970,00		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	500	500	468.452.253,00	500	472.357.800,00	500	479.952.533,00	500	494.421.530,00	500	494.421.970,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				849.780.351,00		861.870.236,00		891.130.107,00		930.152.866,00		921.567.611,00		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	2.000	2.000	849.780.351,00	2.000	861.870.236,00	2.000	891.130.107,00	2.000	930.152.866,00	2.000	921.567.611,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				355.173.721,00		358.134.971,00		358.134.971,00		374.863.765,00		374.863.766,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	800	800	355.173.721,00	800	358.134.971,00	800	358.134.971,00	800	374.863.765,00	800	374.863.766,00		
Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0031 - Bagian Umum	
													4.01.0.00.0.00.01.0033 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				30.144.130.000,00		30.165.230.891,00		30.584.527.600,00		31.159.516.719,00		31.181.328.381,00		

Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi (%)	100	100	912.000.000,00	100	912.384.000,00	100	924.149.538,00	100	941.655.149,00	100	941.319.208,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				912.000.000,00		912.384.000,00		924.149.538,00		941.655.149,00		941.319.208,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1,00	1	912.000.000,00	1	912.384.000,00	1	924.149.538,00	1	941.655.149,00	1	941.319.208,00		
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				832.000.000,00		832.384.000,00		844.149.538,00		861.655.149,00		861.319.208,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	30	30	832.000.000,00	30	832.384.000,00	30	844.149.538,00	30	861.655.149,00	30	861.319.208,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Pemerintahan	
													4.01.0.00.0.00.01.0013 -	

													Bagian Hukum	
													4.01.0.00.0.00.01.0020 - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	
Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti (%)	100	100	15.000.000,00	100	15.217.765,00	100	16.506.627,00	100	17.506.627,00	100	17.670.453,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				15.000.000,00		15.217.765,00		16.506.627,00		17.506.627,00		17.670.453,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	15.217.765,00	12	16.506.627,00	12	17.506.627,00	12	17.670.453,00		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				15.000.000,00		15.217.765,00		16.506.627,00		17.506.627,00		17.670.453,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	15.217.765,00	12	16.506.627,00	12	17.506.627,00	12	17.670.453,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Pemerintahan	
													4.01.0.00.0.00.01.0013 - Bagian Hukum	
													4.01.0.00.0.00.01.0020 - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik (%)	100	100	210.000.000,00	100	210.217.766,00	100	211.217.766,00	100	215.536.584,00	100	215.536.584,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				210.000.000,00		210.217.766,00		211.217.766,00		215.536.584,00		215.536.584,00		

Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	12	12	210.000.000,00	12	210.217.766,00	12	211.217.766,00	12	215.536.584,00	12	215.536.584,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				15.000.000,00		15.217.766,00		16.217.766,00		17.217.766,00		17.217.766,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	15.217.766,00	12	16.217.766,00	12	17.217.766,00	12	17.217.766,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		182.318.818,00		182.318.818,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	6	6	180.000.000,00	6	180.000.000,00	6	180.000.000,00	6	182.318.818,00	6	182.318.818,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Pemerintahan	
													4.01.0.00.0.00.01.0013 - Bagian Hukum	
													4.01.0.00.0.00.01.0020 - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	
Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	80	80	29.007.130.000,00	80	29.027.411.360,00	80	29.432.653.669,00	80	29.984.818.359,00	80	30.006.802.136,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	

	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik (%)	87,84	88		89		90		91		92			
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,8	0,81		0,82		0,82		0,83		0,83			
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				29.007.130.000,00		29.027.411.360,00		29.432.653.669,00		29.984.818.359,00		30.006.802.136,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1	29.007.130.000,00	1	29.027.411.360,00	1	29.432.653.669,00	1	29.984.818.359,00	1	30.006.802.136,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				28.119.130.000,00		28.138.411.360,00		28.542.653.669,00		29.093.818.359,00		29.114.802.136,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	1	28.119.130.000,00	1	28.138.411.360,00	1	28.542.653.669,00	1	29.093.818.359,00	1	29.114.802.136,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				638.000.000,00		639.000.000,00		640.000.000,00		641.000.000,00		642.000.000,00		

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1	638.000.000,00	1	639.000.000,00	1	640.000.000,00	1	641.000.000,00	1	642.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Pemerintahan	
													4.01.0.00.0.00.01.0013 - Bagian Hukum	
													4.01.0.00.0.00.01.0020 - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				868.193.500,00		868.801.239,00		880.877.573,00		897.438.071,00		898.066.278,00		
Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah (%)	93,33	100	68.303.400,00	100	68.249.404,00	100	69.737.587,00	100	70.166.034,00	100	70.264.660,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				68.303.400,00		68.249.404,00		69.737.587,00		70.166.034,00		70.264.660,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	68.303.400,00	1	68.249.404,00	1	69.737.587,00	1	70.166.034,00	1	70.264.660,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				20.736.000,00		21.000.000,00		21.250.000,00		21.500.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	20.736.000,00	1	21.000.000,00	1	21.250.000,00	1	21.500.000,00	1	22.000.000,00		

4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				47.567.400,00		47.249.404,00		48.487.587,00		48.666.034,00		48.264.660,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4	47.567.400,00	4	47.249.404,00	4	48.487.587,00	4	48.666.034,00	4	48.264.660,00		
Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0021 - Bagian Perekonomian	
													4.01.0.00.0.00.01.0022 - Bagian Pembangunan	
													4.01.0.00.0.00.01.0023 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi (%)	100	100	752.500.000,00	100	753.130.004,00	100	763.254.822,00	100	777.977.232,00	100	778.472.306,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP (%)	83,33	83,33		83,33		83,33		83,33		83,33			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				152.500.000,00		152.710.000,00		154.488.984,00		157.766.596,00		157.827.522,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4	4	152.500.000,00	4	152.710.000,00	4	154.488.984,00	4	157.766.596,00	4	157.827.522,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				100.000.000,00		100.137.500,00		101.327.244,00		103.466.596,00		103.490.522,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4	4	100.000.000,00	4	100.137.500,00	4	101.327.244,00	4	103.466.596,00	4	103.490.522,00		

4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				52.500.000,00		52.572.500,00		53.161.740,00		54.300.000,00		54.337.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	2	52.500.000,00	2	52.572.500,00	2	53.161.740,00	2	54.300.000,00	2	54.337.000,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				600.000.000,00		600.420.004,00		608.765.838,00		620.210.636,00		620.644.784,00		
Tercapaianya indikator Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan pada kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	5	5	600.000.000,00	5	600.420.004,00	5	608.765.838,00	5	620.210.636,00	5	620.644.784,00		
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				600.000.000,00		600.420.004,00		608.765.838,00		620.210.636,00		620.644.784,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	5	5	600.000.000,00	5	600.420.004,00	5	608.765.838,00	5	620.210.636,00	5	620.644.784,00		
Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0021 - Bagian Perekonomian	
Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa (%)	86	95	47.390.100,00	100	47.421.831,00	100	47.885.164,00	100	49.294.805,00	100	49.329.312,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Presentase Pendampingan proses PBJ (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				47.390.100,00		47.421.831,00		47.885.164,00		49.294.805,00		49.329.312,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	46	46	47.390.100,00	46	47.421.831,00	46	47.885.164,00	46	49.294.805,00	46	49.329.312,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	103	103		103		103		103		103			

	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	85	85		85		85		85		85			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	85	85	12.000.000,00	85	15.000.000,00	85	15.000.000,00	85	15.000.000,00	85	15.000.000,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				30.000.000,00		27.421.831,00		27.885.164,00		29.294.805,00		29.329.312,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	46	46	30.000.000,00	46	27.421.831,00	46	27.885.164,00	46	29.294.805,00	46	29.329.312,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				5.390.100,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	103	103	5.390.100,00	103	5.000.000,00	103	5.000.000,00	103	5.000.000,00	103	5.000.000,00		
Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.0023 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, dan Bagian PBJ
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Adapun target indikator dan rencana pendanaan sebagaimana dalam tabel.

Tabel 4. 3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

		Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
			4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
2.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
3.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
		Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
		Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

			4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan) dilaksanakan Bagian Pemerintahan;
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi dan Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik dilaksanakan oleh Bagian Organisasi;
3. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Bina Mental, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Umum.
4. Program Prioritas Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi dengan program aksi BUMD Sehat dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian;
5. Program Prioritas Penataan Garis Imajiner dengan program aksi Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah									
2.	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	48,25	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	66,36	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	
4.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Angka	84,35	84,35	84,50	84,55	84,60	84,65	84,70	
5.	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB	%	30,43	84,78	86,96	91,30	93,48	97,83	100,00	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Angka	-	81	81,25	81,5	81,75	82	82,25	
8.	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3,45	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50	
10.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,88	96,98	97,08	97,18	97,28	97,38	97,48	
11.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,82	3,9	3,93	3,97	4,01	4,05	4,07	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa Sekretariat Daerah memiliki 10 Indikator kinerja utama, yang 2 diantaranya merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing

instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Indeks Kebijakan Publik (IKK) merupakan suatu pengukuran yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mana IKK sendiri juga merupakan salah satu indikator dari pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional. Pengukuran IKK akan menghasilkan profil kualitas kebijakan pada seluruh instansi pemerintah baik K/L/D di Indonesia. Profil IKK seluruh instansi pemerintah tersebut kemudian akan dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan bagi pemerintah.

Pengukuran Indeks Kebijakan Publik (IKK) sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengukuran mandiri instansi (*self asessment*), validasi awal penilaian IKK, forum anggota I Dewan Pertimbangan (*board member*), validasi akhir penilaian IKK, forum II anggota Dewan Pertimbangan (*board member*), dan diseminasi praktik baik hasil pengukuran IKK.

Dengan adanya IKK ini, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu secara aktif bergerak untuk dapat mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas kebijakan pada masing-masing instansi di Kabupaten Temanggung melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di setiap instansi.

Berdasarkan Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, formulasi penghitungan IKK yaitu jumlah dari persentase Perencanaan Kebijakan (45%) dan persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (55%).

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	positif	%	97,44	97,44	97,5	98	98,5	99	99.5	
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	positif	%	28,74	28,74	28,80	29	29,5	30	30.5	
4.	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	positif	%	137.73	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung terdapat di Bagian Pengadaan Barang Jasa dengan indikator Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama, Persentase jumlah

pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dan Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah.

Tabel 4. 6
Dukungan Sekretariat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional

No	Program Delegasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah	Sekretariat Tim Pengendali
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa dukungan Sekretariat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional Pengendalian Inflasi terdapat pada Program Perekonomian dan Pembangunan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 4. 7
Daftar Program Sekretariat Daerah dalam Mendukung
Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui bahwa Program Sekretariat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional Pengendalian Inflasi terdapat pada Program Perekonomian dan Pembangunan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Sekretariat Tim Pengendali Inflasi

Daerah, dengan anggaran dari tahun 2026-2029 masing – masing sebesar Rp 15.000.000,- dari Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat Daerah untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat Daerah dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra Sekretariat Daerah ini.

Temanggung, 19 September 2025
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Ripto Susilo

LAMPIRAN
MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PROSES BISNIS	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah	Risiko Kebijakan	Penyusunan produk hukum daerah (Perda dan Perbup) tidak sesuai target waktu perencanaan	RSO.25.99.02.05	16	Perubahan kebijakan di tingkat pusat atau daerah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan	Propemperda dan Propemperkada belum sesuai dengan target waktu pelaksanaan	Meningkatkan koordinasi dengan pusat dan Perangkat Daerah serta meningkatan kemampuan SDM	Sekretaris Daerah	2025-2029
				Risiko Kepatuhan				Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Perda dengan Bagian Hukum	Produk hukum berpotensi tidak sesuai prosedur, bisa ditolak atau dibatalkan			
				Risiko Kecurangan (Fraud)				Risiko Kecurangan (Fraud): Penyalahgunaan wewenang dalam proses penyusunan atau konsultasi hukum (misal manipulasi dokumen/biaya)	Integritas penyusunan hukum menurun, timbul kerugian keuangan/kepercayaan publik			

				Risiko Pemangku Kepentingan				Persepsi negatif stakeholder akibat keterlambatan/ketidaksesuaian produk hukum	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab, potensi konflik sosial/politik			
				Risiko Operasional				Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah	Propemperda dan Propemperkada belum sesuai dengan target waktu pelaksanaan			
				Risiko Bencana				Gangguan akibat bencana alam/non-alam (gempa, banjir, pandemi) yang menghambat penyusunan produk hukum	Proses penyusunan hukum terhenti/tidak sesuai jadwal			
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Risiko Kebijakan	Kurangnya kompetensi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan PPKom	RSO.25.99.02.14	16	Pedoman kompetensi dan pelatihan PBJ tidak memadai atau belum diatur secara lengkap	Pengadaan barang/jasa tidak efisien, kualitas layanan menurun	Meningkatkan kapasitas SDM PPBJ dan PPKom dengan sosialisasi dan Bimtek	Sekretaris Daerah	2025-2029
				Risiko Kepatuhan				SDM JF PPBJ dan PPKom tidak sepenuhnya mematuhi prosedur pengadaan	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai regulasi, risiko sanksi			

				Risiko Kecurangan (Fraud)				Risiko Kecurangan (Fraud): Ada individu yang menyalahgunakan kekurangan kompetensi untuk keuntungan pribadi	Barang/jasa dibeli tidak sesuai spesifikasi, potensi kerugian			
				Risiko Pemangku Kepentingan				Risiko Pemangku Kepentingan: Stakeholder menilai proses PBJ lambat atau tidak kompeten	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab			
				Risiko Operasional				Kurangnya SDM JF PPBJ dan PPKom bersertifikat	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa			
				Risiko Bencana				Gangguan akibat bencana alam/non-alam mempengaruhi proses pengadaan PBJ	Pengadaan barang/jasa tertunda atau gagal dilakukan			

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Risiko Kebijakan	Perangkat Daerah tidak mematuhi aturan ketatalaksanaan	RSO.25.99.02.15	16	Aturan ketatalaksanaan belum jelas atau belum diperbarui	AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB tidak tercapai	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, pembaruan SOP, monitoring rutin, audit internal, pemberian sanksi dan penghargaan, penyediaan sarana dan sistem pendukung agar Perangkat Daerah mematuhi aturan ketatalaksanaan, serta perlu adanya aplikasi terintegrasi.	Sekretaris Daerah	2025-2029
				Risiko Kepatuhan				Perangkat Daerah tidak mematuhi aturan ketatalaksanaan	Penilaian kinerja tidak akurat, target akuntabilitas terganggu			
				Risiko Kecurangan (Fraud)				Ada individu yang sengaja melanggar aturan ketatalaksanaan untuk keuntungan pribadi	Kinerja dinilai tidak objektif, potensi kerugian			

				Risiko Pemangku Kepentingan				Stakeholder menilai ketatalaksanaan di OPD tidak transparan atau tidak disiplin	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab			
				Risiko Operasional				SDM atau sarpras tidak mendukung pelaksanaan ketatalaksanaan dengan baik	Pelaksanaan ketatalaksanaan terganggu, akuntabilitas kinerja menurun			
				Risiko Bencana				Gangguan akibat bencana alam/non-alam mempengaruhi pelaksanaan ketatalaksanaan	Penilaian dan pelaporan kinerja tertunda atau gagal dilakukan			